



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Keterlibatan Arab Saudi terhadap Konflik Houthi di
Yaman Tahun 2015-2019**

Skripsi

Oleh

Maria Nasthasia

2017330025

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Keterlibatan Arab Saudi terhadap Konflik Houthi di
Yaman Tahun 2015-2019**

Skripsi

Oleh

Maria Nasthasia

2017330025

Pembimbing

Dr. Atom Ginting Munthe, M.S.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Maria Nasthasia

NPM : 2017330025

Judul : Keterlibatan Arab Saudi dalam Konflik Houthi di Yaman Tahun 2015-2019

Telah Diuji dalam Sidang Sarjana

Pada Kamis, 21 Januari 2021

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

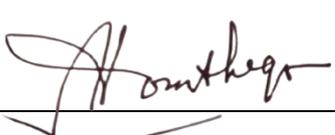
Ketua Penguji Merangkap Anggota

Dr. I Nyoman Sudira, Drs, M.Si.

: 

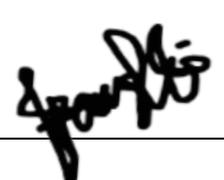
Sekretaris

Dr. Atom Ginting Munthe, M.S.

: 

Anggota

Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si. (Han) :



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Nasthasia

NPM : 201733025

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Keterlibatan Arab Saudi terhadap Konflik Houthi di Yaman Tahun 2015-2019

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulisan ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Tangerang Selatan, 13 Januari 2021



Maria Nasthasia

2017330025

ABSTRAK

Nama : Maria Nasthasia

NPM : 2017330025

Judul : “Keterlibatan Arab Saudi terhadap Konflik Houthi di Yaman Tahun 2015-2019”

Dalam melakukan penelitian ini, pertanyaan penelitian yang akan diajukan adalah, “*Bagaimana keterlibatan Arab Saudi dalam konflik Houthi di Yaman 2015-2019?*” Demi mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan tulisan Stephen D. Krasner mengenai motivasi negara dalam melakukan intervensi terhadap negara lain. Ia berpendapat bahwa intervensi akan dilakukan demi mencapai kepentingan nasional menjaga keamanan nasional, dan peningkatan kekuatan negara pengintervensi, atau ketika negara tersebut ingin mempertahankan *balance of power*. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan teori *Internal Conflict* dari Michael E. Brown, untuk melihat kondisi domestik Yaman apa yang juga menarik Arab Saudi untuk melakukan intervensi terhadap konflik Houthi. Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkap makna dari suatu fenomena, dan mempelajari nilai-nilai yang sesuai dengan konteks sosial fenomena tersebut. Proses pengumpulan data dilakukan melalui proses studi pustaka.

Melalui analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menemukan dua kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah bahwa konflik Houthi disebabkan oleh berbagai permasalahan dalam sektor structural, politik, ekonomi, dan kultural Yaman. Hal ini juga menjadi kondisi yang mengundang Arab Saudi untuk ikut terlibat dalam konflik Houthi. Sedangkan kesimpulan kedua adalah Arab Saudi terlibat dalam konflik Houthi melalui intervensi militernya, serta terlibat dalam proses eskalasi konflik tersebut, dalam upaya pencapaian kepentingan nasional defensive dan oportunistik.

Kata Kunci: Yaman, Arab Saudi, Kepentingan Nasional, *Balance of Power*, Konflik Internal, Kelompok Houthi, Intervensi Militer, Eskalasi Konflik.

ABSTRACT

Name : Maria Nasthasia

Student Number : 2017330025

Title: “Saudi Arabia’s Involvement in the Houthi Conflict in Yemen 2015-2019”

*The main question to be answered in this paper is “**How Saudi Arabia was involved the Houthi Conflict in 2015-2019?**” To see the motivations behind Saudi Arabia’s intervention to Yemen, this paper will use Stephen D. Krasner’s writing in “Sovereignty and Intervention”. Furthermore, the Internal Conflict Theory by Michael E. Brown, will also be used to see the Yemeni domestic conditions that invite intervention from other countries. This research is a qualitative research, and therefore, its purpose is to reveal the value and significance of one event. The study was conducted through literature review.*

There are two conclusions to answer the research question the first one is that the Houthi conflict was caused by internal problems in structural, political, economy, and socio-cultural sectors. These problems were the inviting reason for other countries such as Saudi Arabia to be involved inside the Yemeni conflict. While, the second conclusion is that Saudi Arabia was involved inside the conflict through its military intervention, and also involved in the conflict escalation process, through their search for defensive and opportunistic national interest.

Keywords: Yemen, Saudi Arabia, National Interest, Balance of Power, Internal Conflict, Houthi Movement, Military Intervention, Conflict Escalation.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya yang diberikan, peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul, “Keterlibatan Arab Saudi Terhadap Konflik Houthi di Yaman Tahun 2015-2019”. Penelitian ini diselesaikan demi memperoleh gelar akademik Strata-1 (S1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Selanjutnya, peneliti juga ingin Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing penulis, Bapak Dr. Atom Ginting Munthe, M.S. yang selama ini membimbing saya dengan sabar, serta selalu memberikan saran-saran yang berguna bagi penulisan penelitian ini.

Penelitian ini sendiri berbicara tentang keterlibatan Arab Saudi terhadap konflik Houthi di Yaman pada tahun 2015-2019, serta pengaruhnya terhadap eskalasi konflik tersebut. Peneliti berharap bahwa tulisan ini akan memberikan informasi dan wawasan yang lebih luas bagi para pembaca mengenai topik ini, dan berharap bahwa hasil penelitian dapat dipertimbangkan sebagai salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya dengan tema serupa. Peneliti meminta maaf atas segala kekurangan, secara penulisan maupun dalam memberikan analisa, yang mungkin ada.dalam peneltian ini.

Tangerang Selatan, 13 Januari 2021

Maria Nasthasia

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian dan penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu tanpa dukungan yang diberikan bagi peneliti, oleh karena itu peneliti hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat, dan penyertaannya yang selalu bersama saya. Terima kasih Tuhan karena telah memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar sampai ke jenjang ini, memberikan saya pengalaman untuk berkembang secara pribadi maupun dalam wawasan.
2. Kepada kedua orang tua dan keluarga besar saya yang selalu mendukung pendidikan saya dengan doa dan dalam bentuk lain. Berkat dukungan kalian, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Kepada semua teman-teman yang selalu bersama saya selama menempuh pendidikan di Universitas Parahyangan, terutama Cynthia, Wyona, dan Pauline. Terima kasih atas kebersamaannya, semua bantuan, dan semangat yang diberikan bagi saya selama menempuh jenjang pendidikan ini tidak akan dilupakan.
4. Kepada Yth. Bapak Dr. Atom Ginting Munthe, M.S. yang telah membimbing saya selama 1 semester untuk menulis skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dan kesudiannya untuk membimbing saya, berkat saran-saran yang diberikan Bang Atom, skripsi ini berhasil diselesaikan dengan baik.
5. Kepada para penguji sidang saya, Mas Nyoman dan Mbak Vrames yang telah memberikan kritik dan saran yang berguna bagi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.2.1. Deskripsi Masalah.....	5
1.2.2. Pembatasan Masalah.....	6
1.2.3. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian	8
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	8
1.4. Kajian Literature.....	9
1.5. Kerangka Pemikiran	12
1.6. Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	22
1.6.1. Metodologi Penelitian	22
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data	22
1.7. Sistematika Penulisan	22
BAB II.....	25
KONFLIK INTERNAL YAMAN DAN INTERVENSI ARAB SAUDI TERHADAP KONFLIK HOUTHJI	25
2.1. Pre-kondisi Konflik Internal Yaman	26
2.1.1. Latar Belakang Kelompok Houthi	26

2.1.2. Permasalahan Struktural di Yaman.....	28
2.1.3. Dinamika Politik Yaman.....	36
2.1.4. Permasalahan Ekonomi Yaman.....	42
2.1.5. Ideologi Kelompok Houthi.....	47
2.2. Penyebab Keterlibatan Arab Saudi pada Konflik Houthi	52
2.2.1. Dinamika Kawasan Timur Tengah.....	52
2.2.2. Kepentingan Nasional Arab Saudi.....	54
2.2.3. Operasi Militer Arab Saudi ke Yaman.....	58
BAB III.....	63
ANALISIS.....	63
3.1. Analisis Kondisi Umum yang Mendorong Terjadinya Konflik Yaman	63
3.1.1. Struktural.....	63
3.1.2. Politik.....	68
3.1.3. Ekonomi.....	72
3.1.4. Sosial-Budaya.....	75
3.2. Analisa Kondisi Pemicu yang Mendorong Terjadinya Eskalasi Konflik Yaman ..78	
3.2.1. Alasan Keterlibatan Arab Saudi dalam Konflik Houthi.....	78
3.2.2. Arab Saudi dan Perannya sebagai Bad Neighbours	80
3.2.3. Pengaruh Arab Saudi terhadap Eskalasi Konflik Houthi	86
BAB IV	90
KESIMPULAN	90
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pertumbuhan GDP Yaman Tahun 2015-2019.....	46
Tabel 2.2. Tingkat Pembelian Senjata Arab Saudi Pada Tahun 2006-2014.....	56
Tabel 2.3. Top 5 Negara Eksportir Senjata ke Arab Saudi Tahun 2014-2018.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Menurut Johann Galtung, konflik adalah sebuah kondisi yang dihasilkan melalui interaksi aktor-aktor dengan tujuan yang saling bertentangan.¹ Melalui pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa konflik akan selalu terbentuk, selama masih terdapat interaksi antar manusia yang terjadi. Begitu pula dengan interaksi antar negara maupun kelompok-kelompok dalam suatu negara yang mungkin menghasilkan konflik. Saat ini, Yaman adalah salah satu negara Timur Tengah yang masih mengalami konflik bersenjata akibat perebutan kekuasaan aktor-aktor internal/domestik.

Konflik yang saat ini masih berlangsung di Yaman merupakan ekstensi dari peristiwa Arab Spring yang terjadi pada tahun 2011.² Ketika peristiwa tersebut bermula di Tunisia, masyarakat Yaman telah berada di bawah rezim pemerintahan yang sama selama 33 tahun, dan terinspirasi untuk melakukan protes serupa demi menentang rezim Presiden Ali Abdullah Saleh.³ Hal ini perlu dilakukan karena rezim Presiden Saleh penuh dengan tindakan korupsi dan nepotisme sebagai upaya penghilangan oposisi politik, serta penguhan

¹ Johan Galtung, *"Theories of Conflict: Definitions, Dimensions, Negotiations, Formations"*, (Columbia University: 1958), halaman 24.

² Tom Allinson, "Yemen's Houthi Rebels: Who Are They and What Do They Want?", *Deutsch Welle*, diakses pada 20 September 2020, <https://www.dw.com/en/yemens-houthi-rebels-who-are-they-and-what-do-they-want/a-50667558>.

³ Peter Salisbury, *"Yemen and Saudi-Iranian Cold War"*, Middle East and North Africa Research Programme (February 2015), halaman 6.

kekuasaan Presiden Saleh.⁴ Di bawah kekuasaan Presiden Saleh, Yaman mengalami kemiskinan parah, pemasukan negara yang semakin memburuk, serta kondisi alam yang buruk pula.⁵ Melalui peristiwa demonstrasi Arab Spring, rezim pemerintah Ali Abdullah Saleh berhasil diturunkan, dan kemudian digantikan oleh Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi.

Perubahan yang diharapkan akan terjadi pada kondisi masyarakat Yaman sayangnya tidak juga terwujud. Pemerintahan Presiden Mansour Hadi merupakan pemerintahan yang lemah, dan menimbulkan banyak reaksi ketidakpuasan dari kelompok masyarakat Yaman. Salah satu kelompok yang vokal dalam memberikan perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Mansour Hadi adalah kelompok Houthi.⁶ Perlu diketahui bahwa kelompok Houthi sendiri bermula sebagai organisasi pemuda *Al-Shabbab-al-Moumineen (Believing Youth)* dari sebuah partai politik bernama al-Haq. Gerakan ini berfokus pada kebangkitan ideologi Zaydi, menuntut kebebasan hak-hak kultural yang lebih, menuntut otonomi dan pembangunan ekonomi yang lebih merata bagi daerah masyarakat Zaydi, banyak mendiami bagian Utara Yaman dan memiliki karakteristik budaya dan agama yang khas.⁷

Kelompok Houthi sangat terlibat dalam peristiwa Arab Spring, dan menjadi aktor penting dalam proses pergantian pemerintahan di Yaman. Oleh karena itu, kelompok Houthi juga menjadi kelompok yang sangat vokal pula

⁴ Peter Salisbury, “*Yemen and Saudi-Iranian Cold War*”, halaman 5.

⁵ Ibid, halaman 5.

⁶ Ibid, halaman 5.

⁷ Thomas Juneau, “Iran’s Policy towards the Houthis in Yemen: A Limited Return on Modest Investment”, *International Affairs Vol.92 No.3*, 2016, halaman 651.

dalam menyuarakan ketidakpuasan mereka pada pemerintahan baru Yaman. Usaha Presiden Mansour Hadi dalam memperbaiki sistem pemerintahan dianggap tidak efektif karena hanya mengembalikan sistem pemerintahan Yaman ke bentuk yang sebelumnya (pre-tahun 2011). Selain itu, Presiden Hadi juga berencana membagi Yaman menjadi 6 negara bagian yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setiap negara bagian (melalui otonomi daerah). Rencana kebijakan ini pada awalnya didukung oleh kelompok Houthi, namun kemudian berubah, ketika kelompok Houthi menyadari bahwa daerah tradisional masyarakat Zaydi di Utara Yaman akan terpecah-belah melalui sistem federalisme ini.⁸ Kelompok Houthi kemudian melakukan dominasi paksa atas beberapa kota di Yaman sebagai upaya pelengseran Presiden Mansour Hadi. Aksi ini dilaksanakan mulai dari ibu kota Sanaa, disusul dengan aksi menguasai kota pelabuhan penting, Hodeida.⁹

Keberhasilan aksi kelompok Houthi dalam menguasai 2 kota tersebut menyebabkan terasingkannya Presiden Mansour Hadi ke Arab Saudi setelah mengalami masa tahanan rumah dan terpaksa untuk mundur dari jabatannya.¹⁰ Langkah ini kemudian digunakan Presiden Mansour Hadi untuk mendapat bantuan pemerintah Arab Saudi, demi memadamkan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Houthi.¹¹ Pemerintah Arab Saudi menanggapi permohonan tersebut, dan mulai melakukan intervensi militer ke Yaman pada

⁸ Thomas Juneau, "Iran's Policy towards the Houthis in Yemen", halaman 653.

⁹ Peter Salisbury, *op cit*, halaman 5.

¹⁰ Ibid, halaman 5.

¹¹ Tom Allinson, "Yemen's Houthi Rebels: Who Are They and What Do They Want?", *Deutsch Welle*, diakses pada 20 September 2020, <https://www.dw.com/en/yemens-houthi-rebels-who-are-they-and-what-do-they-want/a-50667558>.

tahun 2015. Arab Saudi tidak melakukan intervensi ini sendiri, tetapi didukung oleh koalisi negara-negara Timur Tengah lainnya.¹² Baik pemerintah Amerika Serikat maupun Inggris bahkan memberikan dukungan pada pasukan koalisi ini, yaitu bantuan *logistic* dan *intelligence*, sebagai pernyataan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Mansour Hadi (sebagai pemerintahan yang diakui dunia internasional, termasuk PBB).¹³

Sayangnya, keterlibatan negara lain dalam konflik internal suatu negara justru tidak menjamin penyelesaian konflik. Dengan bertambahnya aktor yang berperan, kepentingan yang diperjuangkan pun semakin beragam, dan bahkan dapat saling berlawanan. Hal ini membuat konflik berpotensi besar tereskalasi, dan menurut Lisa J. Carlson, seharusnya memadamkan gerakan kelompok yang lebih lemah dalam menanggung resiko eskalasi konflik.¹⁴ Namun, pada kasus konflik Houthi, yang terjadi malah sebaliknya dan tidak ada pihak yang ingin mengalah. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kasus Houthi setelah melihat anomaly tersebut, dan memberi penelitian ini judul “Pengaruh Intervensi Militer Arab Saudi Terhadap Eskalasi Konflik antara Otoritas Keamanan Resmi Yaman dan Kelompok Houthi Tahun 2015-2020”.

¹² Ori Goldberg, “Iran and the Houthi in Yemen”, *International Institute for Counter-Terrorism Publication*, Oktober 2019.

¹³ Melissa Dalton, “US Support for Saudi Military Operations in Yemen”, *CSIS*, 23 Maret 2018, diakses pada 29 Februari 2020, <https://www.csis.org/analysis/us-support-saudi-military-operations-yemen>.

¹⁴ Lisa J. Carlson, “The Theory of Escalation and International Conflict”, *Journal of Conflict Resolution* Vol. 39, No.3, September 1995, halaman 515.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Deskripsi Masalah

Intervensi militer Arab Saudi bermula pada Maret 2015 dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Padahal, pertempuran ini diperkirakan hanya akan berlangsung selama beberapa bulan, terutama dengan kemampuan peralatan militer Arab Saudi. Selain itu, secara ideal, intervensi dalam sebuah konflik dimaksudkan untuk membantu proses penyelesaian konflik tersebut. Sayangnya dalam kasus ini, justru terjadi sebaliknya. Melalui serangan militer yang dilakukan koalisi Arab Saudi, konflik Yaman semakin panas dan banyak menelan korban sipil. Eskalasi konflik antara kelompok Houthi dan otoritas keamanan resmi Yaman juga menyebabkan ketiadaan kekuasaan pusat yang dapat menangani berbagai masalah kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi berkonflik, roda kehidupan masyarakat jelas terhenti dan sebagian besar *resource* negara hanya dialokasikan untuk berperang. Eskalasi konflik Houthi yang diperparah intervensi militer Arab Saudi ini sangat mengganggu stabilitas dalam negeri Yaman.

Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan kasus blokade laut yang diterapkan Arab Saudi terhadap Yaman.¹⁵ Tujuan dari blokade laut ini adalah untuk menghentikan suplai dana dan senjata bagi kelompok Houthi

¹⁵ Julian Borger, "Saudi Led Naval Blockade Leaves 20m Yemenis Facing Humanitarian Crisis", *The Guardian*, Terakhir diubah 5 Juni 2015, <https://www.theguardian.com/world/2015/jun/05/saudi-led-naval-blockade-worsens-yemen-humanitarian-disaster>.

dari Iran. Tetapi pada kenyataannya, blokade laut juga menghentikan suplai bantuan kemanusiaan yang berusaha diberikan oleh dunia internasional. Masyarakat sipil yang menjadi korban konflik, terlantar tanpa bantuan medis maupun bantuan dasar kemanusiaan seperti sandang, pangan, dan papan. Menyebabkan hampir setengah dari populasi Yaman (14 juta orang) menderita kemiskinan, kekurangan gizi, serta menderita penyakit terkait seperti diare dan kolera.¹⁶ Keadaan ini tercatat sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia selama 50 tahun terakhir.¹⁷

Melalui data tersebut, dapat terlihat bagaimana eskalasi konflik dapat menjadi penyebab dari masalah sosial lainnya, serta urgensi dari penyelesaian konflik di Yaman. Sebab, penyelesaian permasalahan sosial dan kesejahteraan masyarakat Yaman sangat tergantung dengan penyelesaian konflik antara otoritas resmi keamanan Yaman dan kelompok Houthi.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Dalam meneliti konflik Yaman, peneliti hanya akan membahas konflik bersenjata antara kelompok Houthi dan otoritas keamanan resmi Yaman, serta peran intervensi militer Arab Saudi dalam eskalasi konflik tersebut. Pembatasan isu ini perlu dilakukan karena menurut Galtung, kekerasan dapat terjadi dalam 2 level, yaitu kekerasan *latent* dan

¹⁶ Declan Walsh, “*The Tragedy of Saudi Arabia’s War*”, New York Times, terakhir diubah 26 Oktober 2018, diakses pada 29 Februari 2020,

<https://www.nytimes.com/interactive/2018/10/26/world/middleeast/saudi-arabia-war-yemen.html>.

¹⁷ Melissa Dalton, “US Support for Saudi Military Operations in Yemen”, CSIS, 23 Maret 2018, diakses pada 29 Februari 2020, <https://www.csis.org/analysis/us-support-saudi-military-operations-yemen>.

manifest.¹⁸ Kekerasan *latent* berbicara mengenai keadaan di mana aksi kekerasan belum terjadi, tetapi dapat dengan mudah dipicu untuk terjadi, karena terdapat masalah yang sebelumnya sudah terkulminasi. Bentuk kekerasan tersebut dapat bergerak menjadi kekerasan *manifest* yang merupakan suatu bentuk kekerasan yang sudah terealisasikan. Konflik bersenjata sendiri menghasilkan kekerasan pada tingkat *manifest* (tingkat paling tinggi), sehingga pasti akan menimbulkan korban jiwa, dan urgensi penyelesaiannya sangat tinggi.¹⁹ Terbukti per tahun 2019, konflik bersenjata antara koalisi Arab Saudi dan kelompok Houthi diperkirakan telah menelan 8.338 jiwa warga sipil.²⁰

Selain itu, karena terdapat berbagai negara yang tergabung dalam koalisi intervensi militer ke Yaman, peneliti memilih fokus pada Arab Saudi yang memimpin gerakan intervensi militer tersebut. Peneliti juga membatasi *timeframe* penelitian pada tahun 2015-2019, sesuai keterlibatan Arab Saudi dalam intervensi militer ke Yaman yang dimulai pada tahun 2015. Topik penelitian hanya dibatasi hingga tahun 2019 karena terdapatnya perjanjian Stockholm pada akhir tahun 2018, sehingga pada

¹⁸ Johan Galtung, "Violence, Peace and Peace Research", *Journal of Peace Research* Vol.6 No.3, 1969, halaman 172.

¹⁹ Ibid, halaman 172.

²⁰ "Yemen: event of 2019", *Human Rights Watch*, diakses pada 9 Oktober 2020, <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/yemen>.

tahun 2019, hasil perjanjian tersebut mulai diupayakan implementasinya walaupun konflik belum sepenuhnya selesai.²¹

1.2.3. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang dan pembatasan masalah di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yang akan berusaha dijawab, yaitu *“Bagaimana keterlibatan Arab Saudi dalam konflik Houthi di Yaman tahun 2015-2019?”*

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan bagaimana keterlibatan Arab Saudi dalam konflik Houthi di Yaman.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

- Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi lebih lanjut kepada para pembaca, mengenai linimasa dari konflik Houthi di Yaman dan keterlibatan Arab Saudi di dalamnya.
- Peneliti berharap bahwa tulisan ini akan memberikan informasi dan wawasan yang lebih luas bagi para pembaca, mengenai keterlibatan Arab Saudi serta dampaknya pada konflik Houthi, di Yaman.
- Peneliti berharap penelitian ini dapat dipertimbangkan sebagai salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya dengan tema serupa.

²¹ “Parties to Conflict in Yemen Have Accepted Plan to Redeployment of Forces from Hodeidah Port”, *United Nation News*, terakhir diubah pada 15 April 2019, diakses pada 10 Oktober 2020, <https://www.un.org/press/en/2019/sc13780.doc.htm>.

1.4. Kajian Literature

Akan digunakan beberapa literatur sebagai pedoman penulisan, serta sebagai sumber bagi peneliti, untuk memperluas pengetahuannya mengenai topik penelitian. Berikut adalah sumber-sumber tersebut:

May Darwich – “The Saudi Intervention in Yemen: Struggling for Status”, *Insight Turkey Journal*, Vol. 2 No. 2, 2018.

Dalam jurnal ini May Darwich berpendapat bahwa tujuan intervensi Arab Saudi akan konflik otoritas resmi adalah demi menetapkan statusnya sebagai *regional leader* di Timur Tengah. Status sebuah negara menjadi penting karena melalui status, ia dapat mendefinisikan siapa negara itu dan bagaimana posisi negara tersebut dalam komunitas-nya. Melalui status, sebuah negara dapat memperoleh *influence*/kekuatan untuk mencapai kepentingan material lainnya. Status negara juga dapat menjadi sumber permasalahan apabila perlakuan yang diterima oleh sebuah negara, tidak sesuai dengan status yang ia miliki/harapkan. Oleh karena itu, sangat mungkin dan rasional bagi sebuah negara untuk mengupayakan kepemilikan status yang lebih tinggi, termasuk dengan cara berperang.

Arab Saudi sendiri selalu melakukan klaim sebagai kekuatan regional Timur Tengah, serta klaim sebagai pemimpin umat Islam Sunni. Namun, klaim ini dirasa kurang berdasar, karena Arab Saudi dianggap terlalu bergantung terhadap kerjasama keamanan miliknya dengan Amerika Serikat sebagai aktor yang menjaga posisinya sebagai kekuatan besar di Timur Tengah. Oleh karena itu,

Arab Saudi ingin mencari kesempatan untuk membuktikan kekuatannya. Bagi Arab Saudi, konflik di Yaman merupakan kesempatan yang tepat untuk membuktikan kemampuannya dalam menjaga stabilitas kawasan, karena dianggap sebagai konflik yang akan mudah diselesaikan.

Syed Huzaifah bin Othman Alkaff - "Yemen", *Counter Terrorist Trends and Analyses Vol.8 No.1, 2016.*

Penulis jurnal juga setuju bahwa keterlibatan Arab Saudi dalam konflik yang terjadi di Yaman saat ini adalah upaya Saudi dalam meraih *influence* dalam regionnya. Arab Saudi khawatir akan pengaruh Iran yang semakin meluas di Timur Tengah, termasuk pada kelompok Houthi di Yaman. Kekhawatiran ini terutama disebabkan posisi geografis Yaman yang strategis, yaitu kepemilikan akses terhadap Selat Bab Al-Mandab. Melalui selat ini, Laut Arab dan Laut Merah dapat terhubung, serta dapat menjadi jalur perdagangan yang lebih singkat dalam menghubungkan Jazirah Arab dan benua Eropa. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa selain motif kekuasaan, Arab Saudi juga memiliki motif ekonomi dalam upaya keterlibatannya untuk menyelesaikan konflik di Yaman. Menurut penulis jurnal, faktor inilah yang menyebabkan Arab Saudi kesulitan dalam memadamkan konflik di Yaman.

Selain itu, jurnal ini juga berpendapat bahwa para anggota otoritas keamanan Yaman resmi sebenarnya tidak memiliki kesetiaan pada rezim politik Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi. Yaman yang sebelumnya terbagi menjadi 2 bagian (Yaman Utara dan Selatan), tidak pernah berhasil membentuk identitas

nasional yang mengalahkan identitas Utara dan Selatan. Isu ini dengan cepat kembali muncul ke permukaan ketika rezim pemerintahan Presiden Ali Abdullah Saleh jatuh, setelah sebelumnya menempati kursi kekuasaan selama 33 tahun. Konflik di antara kelompok Houthi dan otoritas keamanan Yaman juga merupakan perpanjangan perpecahan nasional tersebut. Akibatnya, sebagian besar anggota otoritas keamanan resmi Yaman adalah para elite politik dan pejuang dari Selatan yang anti terhadap kelompok Houthi, dan memiliki agenda mereka masing-masing. Melihat hal ini, penulis jurnal berpendapat bahwa selama kedua akar permasalahan konflik di Yaman belum terselesaikan, konflik antara para pendukung rezim Presiden Hadi dan kelompok Houthi akan sulit untuk terselesaikan.

Mohammad Nuruzzaman, “Chasing the Dream: The Salman Doctrine and Saudi’s Bid for Regional Dominance”, *Insight Turkey Journal Vol. 21 No. 23, 2019.*

Jurnal ini juga berpendapat bahwa alasan Arab Saudi untuk terlibat dalam intervensi militer dalam konflik Yaman disebabkan oleh keinginan Arab Saudi untuk mencapai dominasi regional Timur Tengah. Langkah ini sendiri diambil karena keadaan geopolitik Timur Tengah yang sejak tahun 2003, lebih menguntungkan Iran dalam berkembang secara militer, politik, maupun ekonomi. Sangat berbeda dengan Arab Saudi yang hanya mengandalkan kesepakatan keamanannya dengan Amerika Serikat, untuk mempertahankan keamanan nasionalnya di Timur Tengah. Secara ekonomi, Arab Saudi juga sangat bergantung hanya terhadap industry minyak tanpa ada upaya diversifikasi

ekonomi yang berarti. Menyadari hal ini, Arab Saudi semakin waspada akan potensi ancaman terhadap dominasi region miliknya.

Arab Saudi juga melihat keberadaan Iran dalam konflik ini juga sebagai upaya dominasi region Timur Tengah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencegah terbentuknya pemerintahan Yaman yang dikuasi Houthi. Namun, berbeda dengan kedua jurnal sebelumnya, Nurruzzaman berpendapat bahwa eskalasi konflik antara kelompok Houthi dan otoritas keamanan resmi Yaman di sebabkan oleh kegagalan Arab Saudi dalam mengimplementasikan kebijakan luar negeri miliknya. Kebijakan luar negeri yang dimaksud penulis jurnal disebut juga sebagai "*Salman Doctrine*", yaitu kebijakan luar negeri baru Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud yang menekankan strategi militer dalam menjaga posisi Arab Saudi sebagai penguasa regional. Sedangkan kedua jurnal sebelumnya, mengkritisi kepentingan nasional Arab Saudi yang dianggap terlalu banyak mencampuri dan menghalangi tujuan awal dari sebuah intervensi militer, yaitu penyelesaian sebuah konflik.

Ketiga jurnal telah memberikan referensi bagi peneliti dalam memahami motivasi Arab Saudi untuk melakukan intervensi militer ke Yaman serta mengapa aksi tersebut gagal memberikan hasil yang diinginkan, namun belum dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan analisa lebih lanjut menggunakan kerangka pemikiran berikut.

1.5. Kerangka Pemikiran

Berikut adalah konsep-konsep yang akan digunakan dalam menganalisa pertanyaan penelitian. Sebelum berlanjut pada berbagai teori dan konsep yang lebih lanjut, perlu dimengerti apa itu konflik. Menurut Galtung, konflik adalah interaksi aktor-aktor dengan tujuan yang saling bertentangan. Meskipun tidak selalu berakhir dengan kekerasan, konflik dapat meningkat/tereskalisasi dan dapat berakhir pada tingkat yang paling parah, yaitu perang.²² Konflik dapat terjadi antar negara maupun intra-negara (di dalam satu negara), tetapi sebagian besar konflik bersenjata yang terjadi setelah berakhirnya Perang Dingin adalah konflik internal (intra-negara). Tercatat bahwa dari tahun 1989 hingga 1996, terdapat 96 konflik bersenjata, dan hanya 5 diantaranya yang merupakan konflik antar negara.²³

Demi melihat bagaimana konflik di Yaman dapat terbentuk, akan digunakan teori Konflik Internal Michael E. Brown. Jenis konflik ini sendiri didefinisikan Brown sebagai konflik (atau berpotensi menghasilkan) kekerasan yang bersumber kepada perselisihan politik domestik (bukan faktor sistemik). Kekerasan yang dihasilkan utamanya terjadi dalam batas wilayah suatu negara, dan berbeda dengan jenis kekerasan massal lainnya yang tidak memiliki agenda politik.²⁴ Menurut Brown, konflik di suatu negara disebabkan oleh 4 kondisi umum dan 4 kondisi pemicu. Kondisi umum yang dimaksud adalah kondisi structural, politik, ekonomi, dan budaya. Sedangkan 4 kondisi pemicu yang dapat menghasilkan

²² Johan Galtung, *Theories of Conflict: Definitions, Dimensions, Negotiations, Formations*, Columbia University Press, 1958, halaman 24.

²³ Peter Wallensteen dan Margareta Sollenberg, "The End of International War? Armed Conflict, 1989-1995", *Journal of Peace Research*, Agustus 1996, halaman 5.

²⁴ Michael E. Brown, *The International Dimensions of Internal Conflicts*, Cambridge: MIT Press, 1996, halaman 1.

konflik internal terbagi menjadi 2 kategori, kondisi yang berasal dari luar (*externally-driven*) dan dari dalam negeri sendiri (*internally-driven*).²⁵ Kondisi pemicu yang bersifat internal adalah pemimpin yang buruk (*bad leader*), keadaan domestik yang buruk (*bad domestic condition*), sedangkan kondisi pemicu yang bersifat eksternal adalah tetangga buruk (*bad neighbours*), dan lingkungan yang buruk (*bad neighbourhood*).²⁶ Secara khusus, peneliti akan menggunakan konsep 4 kondisi umum serta konsep *bad neighbours* untuk meneliti eskalasi konflik Houthi di Yaman.

Pada kondisi struktural, terdapat 3 kondisi yang dapat menimbulkan konflik, antara lain kondisi negara yang lemah, masalah keamanan intra-negara, dan geografis penyebaran kelompok etnis. Kondisi negara yang lemah dapat disebabkan oleh kemerdekaannya yang diberikan oleh negara lain, sehingga negara tersebut kurang memiliki legitimasi atas institusi politik yang dapat menjaga menjaga keutuhan wilayah negaranya.²⁷ Kondisi ini kemudian dapat menciptakan masalah keamanan intra-negara yang juga dapat menjadi penyebab konflik. Negara yang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi masyarakatnya, akan menyebabkan upaya lokal/daerah masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri. Upaya keamanan yang dilakukan oleh masing-masing kelompok lokal ini juga akan mendorong terjadinya *security dilemma*, karena peningkatan kemampuan bagi satu kelompok dapat menjadi ancaman keamanan bagi kelompok lainnya. Apabila negara memiliki kemampuan untuk

²⁵ Michael E. Brown, halaman 548.

²⁶ *Ibid*, halaman 14.

²⁷ *Op cit*, halaman 14

melindungi masyarakatnya secara merata, kemampuan pemerintah sentral akan dirasakan oleh seluruh masyarakat, tidak akan membentuk *security dilemma*. Konflik juga akan semakin mudah terbentuk ketika sebuah negara memiliki berbagai kelompok etnis yang tinggal di wilayahnya, terutama apabila setiap kelompok tinggal secara eksklusif dan tidak banyak berinteraksi antara satu sama lain.²⁸

Pada kondisi politik, konflik dapat ditimbulkan oleh 4 kondisi, yaitu institusi politik yang diskriminatif, ideologi nasional yang eksklusif, dominasi intra-kelompok, dan elitis politik.²⁹ Sistem politik yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu akan mencegah kelompok tersebut untuk berpartisipasi di bidang pemerintahan, militer, sistem peradilan dan institusi politik. Diskriminasi ini membuat masyarakat Yaman sulit memperbaiki taraf hidup, terlihat dari teori mobilisasi sosial Pitirim Sorokin, yang mengatakan bahwa tingkat kekayaan merupakan salah satu faktor yang mendefinisikan kelas sosial seseorang. Sedangkan, kelas sosial dapat bergerak secara horizontal maupun vertical, melalui saluran sosial berupa institusi angkatan bersenjata, pendidikan, organisasi politik, lembaga keagamaan, organisasi ekonomi, dan organisasi keahlian.³⁰ Konsep diskriminasi sendiri dapat diartikan sebagai bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan terhadap hak-hak manusia yang didasarkan kepada ras, warna kulit, keturunan, etnis, yang menghalangi pengakuan, kebebasan seseorang untuk

²⁸ Michael E. Brown, halaman 14-15

²⁹ *Ibid*, halaman 16-18.

³⁰ Richard L. Simpson, "Pitirim Sorokin and His Sociology", *Social Forces Volume 32, Issue 2*, Desember 1953, halaman 121-122.

berbuat dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan lainnya.³¹ Sedangkan, konsep suku tribal diartikan sebagai kelompok sosial yang ikatan anggotanya didominasi ikatan persaudaraan, serta memiliki kultur (dialek, daerah asal, dan kebiasaan) yang khas. Walaupun tidak selalu hidup dalam kepemimpinan politik yang sentral, biasanya sebuah suku tribal bersatu secara politik.³²

Kondisi lainnya yang dapat menimbulkan konflik adalah ideologi nasional yang eksklusif merujuk kepada bagaimana pemerintahan dan keuntungan yang diberikan negara hanya dirasakan kelompok tertentu dalam suatu masyarakat negara.³³ Hak istimewa ini dapat diberikan atas dasar kesukuan atau kelompok agama. Pemerintah yang tidak dapat mengakomodir kepentingan seluruh pihak, dapat merubah sifat nasionalis/loyalitas masyarakat yang terdiskriminasi kepada negara, menjadi loyalitas terhadap kelompoknya sendiri yang dianggap lebih efektif dalam memberikan/menjaga hak-hak masyarakat. Konflik juga dapat muncul melalui dominasi antar partai politik dalam kursi pemerintahan, yang menciptakan pola hubungan politik penuh ambisi, ketakutan, dan kekerasan untuk saling mendominasi kelompok politik lain. Kondisi lainnya yang dapat menciptakan konflik adalah pemerintah yang memanfaatkan kekacauan dalam negara untuk mengambil keuntungan ekonomi maupun politik bagi kelompoknya sendiri, dan menyalahkan kelompok lain atas perbuatan tersebut.

Pada kondisi ekonomi, terdapat 3 kondisi yang dapat memunculkan konflik,

³¹ International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination, *United Nations Human Rights Office of The High Commissioner (OHCHR)*, diakses pada 19 Desember 2020, <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx>.

³² R. Tapper, dikutip dalam P. Khoury dan J. Kostiner, *"Tribes and State Formation in the Middle East"*, (Los Angeles: University of California Press, 1990), halaman 5.

³³ Michael E. Brown, halaman 16-18.

yaitu permasalahan ekonomi, sistem ekonomi yang diskriminatif, instabilitas pembangunan ekonomi dan modernisasi.³⁴ Perekonomian negara yang buruk akan menyebabkan angka pengangguran, inflasi yang tinggi. Konflik akan mudah terbentuk apabila terdapat kompetisi yang besar akan sumber daya yang terbatas. Ketidakmerataan dalam distribusi sumber daya maupun kesempatan bekerja demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan menimbulkan perasaan iri diantara kelompok masyarakat dan menimbulkan konflik. Selain itu, konflik dapat pula muncul akibat instabilitas yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi dan modernisasi teknologi. Perubahan sosial dan ekonomi yang dihasilkan oleh kedua faktor tersebut dapat menimbulkan konflik. Misalnya, peningkatan literasi, edukasi, dan akses terhadap media massa membuat masyarakat sadar akan keadaan domestik negaranya. Akan terdapat ekspektasi tinggi terhadap pembangunan dan perkembangan negaranya, dan apabila ekspektasi tersebut tidak berhasil diwujudkan, akan menimbulkan kekecewaan masyarakat. Terdapat pula fenomena sosial yang dapat disebabkan oleh pembangunan ekonomi seperti migrasi dan urbanisasi, penambahan kelompok sosial baru dalam suatu daerah tentunya dapat menimbulkan friksi di antara para pendatang dan masyarakat yang sudah terlebih dahulu tinggal di daerah tersebut.

Pada kondisi budaya, terdapat dua kondisi yang dapat menimbulkan konflik, yaitu diskriminasi budaya terhadap kelompok minoritas dan persepsi historis

³⁴ *Ibid*, halaman 19-20.

antar kelompok.³⁵ Diskriminasi yang dilakukan berdasarkan etnis dan dalam bidang budaya, seperti pelarangan pelaksanaan aktivitas kebudayaan, dan kebebasan beragama dapat menjadi kondisi yang memicu konflik. Selain itu, persepsi historis dalam suatu kelompok terhadap kelompok lain membentuk pola perilaku di antara kedua kelompok. Persepsi ini juga diturunkan secara turun temurun sehingga memungkinkan permasalahan di masa lalu membentuk sikap antipati suatu kelompok pada kelompok lain di masa sekarang. Persepsi ini dapat membentuk generalisasi dan menjadi justifikasi untuk melakukan diskriminasi terhadap kelompok lain.

Konsep *bad neighbours* yang akan digunakan dalam penelitian ini muncul dari pendapat Brown mengenai beberapa jenis intervensi yang dapat dilakukan oleh negara tetangga, yaitu intervensi humanitarian, intervensi defensif, intervensi protektif, intervensi oportunistik, dan invansi oportunistik.³⁶ Menurut James Roseneau, konsep intervensi ini sendiri didefinisikan sebagai tindakan suatu negara untuk terlibat dalam urusan negara lain, ketika negara tersebut dinilai gagal melaksanakan kewajibannya.³⁷ Penyebab utama dari pelaksanaan intervensi suatu negara adalah terdapatnya perbedaan motivasi di antara negara-negara yang terlibat.³⁸ Kelimanya memiliki tujuan yang berbeda, yaitu demi meringankan penderitaan kemanusiaan dan mengembalikan keamanan dan perdamaian kawasan, demi menjaga keamanan nasional, dan demi melindungi suatu masyarakat dari penindasan etnis, maupun campur tangan yang dilakukan untuk

³⁵ Michael E. Brown, *op cit*, halaman 21.

³⁶ *Ibid*, halaman 596.

³⁷ James N. Rosenau, "Intervention as a Scientific Concept" *The Journal of Conflict Resolution* 13, no. 2, 1969, halaman 153.

³⁸ *Ibid*, halaman 153.

memenuhi kepentingan politik, ekonomi, militer, dan invasi-invasi yang memanfaatkan situasi.³⁹ Namun sayangnya, tidak semua upaya intervensi dapat berhasil, sehingga apabila intervensi tersebut justru menjadi penyebab eskalasi konflik, negara yang melakukan upaya tersebut dinamai sebagai *bad neighbour* atau “tetangga jahat”.⁴⁰

Melihat hal tersebut, kegiatan intervensi sebenarnya dapat pula diartikan sebagai alat mencapai kepentingan nasional suatu negara, yang diartikan Donald E. Neuchterlein sebagai kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai suatu negara berkenaan dengan negara lainnya, dan akan dicapai melalui kebijakan luar negeri (sifatnya eksternal).⁴¹ Menurut Morgenthau, intervensi sendiri tidak dapat dilakukan berdasarkan moralitas atau ideologi sendiri, tetapi harus dilakukan berdasarkan bagaimana konflik di suatu negara berdampak bagi kepentingan negara pengintervensi.⁴² Apabila intervensi hanya didasarkan pada moralitas, hal ini akan mengharuskan sebuah negara untuk mengintervensi semua konflik yang terjadi di negara lain. Oleh karena itu, ketika akan melakukan intervensi, negara harus mempertimbangkan pengaruh intervensi tersebut terhadap kepentingan nasionalnya, serta mempertimbangkan apakah kekuatan/kapabilitas negara tersebut cukup untuk melakukan intervensi dengan sukses.⁴³

³⁹ Michael E. Brown, *op cit*, halaman 1.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 25.

⁴¹ Donald E. Neuchterlein, “National Interest and Foreign Policy”, *British Journal of International Studies Vol.2 No.3*, 1976, halaman 247.

⁴² Hans J. Morgenthau, “To Intervene or Not To Intervene”, *Foreign Affairs Vol. 45 No. 3*, 1967, halaman 430.

⁴³ *Ibid*, halaman 436.

Melengkapi pandangan Morgenthau, Krasner berpendapat bahwa negara dapat melakukan intervensi berdasarkan kepentingan nasional, atau ketika negara tersebut ingin mempertahankan *balance of power*. Kepentingan nasional yang ingin dicapai melalui langkah intervensi adalah keamanan nasional serta demi meningkatkan kekuatan negara pengintervensi. Hal ini menjadi penting karena konflik di negara lain dapat mengancam keamanan nasional, apabila konflik tersebut menyebabkan instabilitas internasional, ataupun karena konflik tersebut dianggap mengancam kestabilan politik dalam negeri sang pengintervensi.⁴⁴ Alasan lainya bagi negara untuk melakukan intervensi adalah *balance of power*, hal ini dikarenakan konflik internal suatu negara dapat merubah orientasi ataupun penguasa negara tersebut. Perubahan ini dapat pula merubah tatanan internasional, menggeser kondisi *balance of power* yang sebelumnya sudah ada.

Selain konsep intervensi dan kepentingan nasional, konsep lainnya yang perlu mengerti adalah eskalasi konflik. Eskalasi terjadi ketika para aktor berkonflik menggunakan cara-cara yang lebih berat untuk menunjukkan ketidaksetujuan/selisih yang terjadi di antara mereka.⁴⁵ Misalnya dalam suatu konflik, seorang aktor menyatakan ketidakpuasannya terhadap aktor lain, ketika pernyataan tersebut berubah menjadi tuntutan atau bahkan mulai menggunakan kekerasan untuk mencapai keinginan tersebut, konflik tersebut dapat dikatakan telah tereskalasi. Eskalasi juga akan meningkatkan resiko serta jumlah *resources* yang dikonsentrasikan pada konflik tersebut, sehingga mengharuskan pihak

⁴⁴ Stephen D. Krasner, "Sovereignty and Intervention", *Beyond Westphalia?: National Sovereignty and International Intervention*, (Maryland: John Hopkins University Press), 1995, halaman 232.

⁴⁵ Dean G. Pruitt, "Social Conflict: Some Basic Principles", *Journal of Dispute Resolution Vol. 2007, Issue 1*, 2007, halaman 152.

berkonflik untuk mempertimbangkan kapabilitas negaranya untuk bertahan dari eskalasi konflik.⁴⁶ Hal ini dikarenakan, menurut perspektif model Konflik Spiral, eskalasi terbentuk dari lingkaran aksi dan reaksi yang buruk, dan aksi perselisihan suatu pihak akan menimbulkan respons perselisihan yang bersifat lebih lanjut dari aksi yang direspons.

Model spiral menggambarkan bahwa eskalasi suatu konflik bermula dari pemberian sanksi pada aktor lainnya.⁴⁷ Sanksi ini diharapkan akan menimbulkan respons positif dari aktor tersebut, namun pada kenyataannya justru memancing reaksi buruk dari penerima sanksi. Perasaan takut maupun amarah yang ditimbulkan akan menyebabkan pihak tersebut menjadi lebih agresif, menimbulkan rasa benci dan bahkan menggunakan kekerasan sebagai bentuk pertahanan diri. Dalam tahap ini, sang penerima sanksi mungkin akan memperluas tujuan/tuntutan yang ingin dimenangkan. Demi mengatasi respons agresif ini, pihak pemberi sanksi akan meningkatkan responsnya dengan memberi sanksi yang lebih berat.⁴⁸ Bentuk aksi-reaksi inilah yang akan menimbulkan eskalasi konflik serta mempersulit penyelesaian masalah. Sebab, bertambahnya tuntutan yang ingin dimenangkan akan menyebabkan pihak berkonflik tidak ingin melakukan konsesi (*high aspiration for victory*), sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan damai.⁴⁹

⁴⁶ Lisa J. Carlson, halaman 515.

⁴⁷ Pruitt, "Social Conflict: Some Basic Principles", halaman 152.

⁴⁸ Ibid, halaman 153.

⁴⁹ Jeong Ho-won, "*Understanding Conflict and Conflict Analysis*", (London: Sage Publication, 2008), halaman 154-157.

1.6. Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metodologi Penelitian

Metodologi yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah metode kualitatif *case study*. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisa sebuah kasus spesifik, yaitu mengenai intervensi militer Arab Saudi pada konflik Houthi di Yaman.⁵⁰ Menurut John Cresswell, penelitian kualitatif memiliki ciri dimana peneliti menjalin interaksi secara intens dengan fenomena yang ditelitinya.⁵¹ Ciri ini disebabkan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap makna dari suatu fenomena, dan mempelajari nilai-nilai yang sesuai dengan konteks sosial fenomena tersebut.⁵² Melalui penelitian ini, diharapkan akan memberikan pemahaman baru mengenai eskalasi konflik yang disebabkan oleh intervensi negara lain

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang didapatkan oleh peneliti akan bersumber dari buku, *website* resmi, artikel jurnal, artikel berita, maupun laporan dan publikasi dari para pengamat/ilmuwan Hubungan Internasional (studi pustaka).⁵³ Peneliti juga akan menggunakan internet untuk mendapatkan data-data pendukung.

1.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan ditulis menggunakan kerangka berikut:

⁵⁰ Umar Suryadi Bakry, “*Metode Penelitian Hubungan Internasional*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2015, halaman 113.

⁵¹ John W. Cresswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches 4th edition*, (Los Angeles: SAGE Publication, 2014).

⁵² *Ibid.*

⁵³ Umar Suryadi Bakry, “*Metode Penelitian Hubungan Internasional*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), halaman 113.

- **Bab 1**

Dalam Bab 1, akan diberikan deskripsi situasi umum konflik Houthi di Yaman dan bagaimana akhirnya Arab Saudi dapat terlibat dalam konflik tersebut. Deskripsi tersebut tertuang di dalam bagian Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Literature, Kerangka Pemikiran, Metodologi yang akan digunakan dan Kerangka Penulisan.

- **Bab 2**

Penulisan bab 2 akan didasarkan teori konflik internal Michael E. Brown, dan akan berbicara mengenai asal mula konflik Houthi di Yaman melalui 4 pre-kondisi dari sebuah konflik internal. Di dalam bab ini juga akan membahas intervensi militer yang dilakukan Arab Saudi dan perannya sebagai bad neighbours dalam teori Brown. Berikut adalah struktur penulisan bab 2:

2.1. Pre-kondisi Konflik Internal Yaman

2.1.1. Latar Belakang Kelompok Houthi

2.1.2. Permasalahan Struktural di Yaman

2.1.3. Dinamika Politik Yaman

2.1.4. Kondisi Perekonomian Yaman

2.1.5. Ideologi Kelompok Houthi

2.2. Keterlibatan Arab Saudi dalam Konflik antara Otoritas Resmi Yaman dan Kelompok Houthi

2.2.1. Operasi *Decisive Storm*

2.2.2. Operasi *Restoring Hope*

- **Bab 3**

Bab ini akan berisi analisa bagaimana keterlibatan Arab Saudi mempengaruhi eskalasi konflik Houthi di Yaman. Analisa akan dilakukan menggunakan teori konflik internal Michael E. Brown dan teori eskalasi konflik Jeong Ho-Won

- **Bab 4**

Bab ini akan berisi jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan peneliti, serta kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya.